

65-121 3) 96/10588

**TELAAH KEIKUTSERTAAN UNSUR-UNSUR PENGELOLA
KELUARGA BERENCANA DESA DALAM MENINGKATKAN
PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI PEDESAAN**



UNIVERSITAS TERBUKA

Oleh:
SAMBAS PRABAWA

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TERBUKA**

Pebruari, 1995

KATA PENGANTAR

Akhirnya Studi Literatur ini selesaikan juga meskipun mengalami banyak hambatan dalam mencari sumber-sumber kepustakaan. Tetapi dalam penulisan ini tidak berpengaruh pada kualitas. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kami, lakukan penelaahan.

Adapun penulisan laporan tentang "Telaah Keikutsertaan Unsur-unsur Pengelola Keluarga Berencana Desa dalam Meningkatkan Program Keluarga Berencana di Pedesaan dimaksud untuk melihat peranan dan usaha pengelola keluarga berencana di pedesaan dan memperoleh informasi dari berbagai literatur.

Selanjutnya ucapkan terimakasih yang disampaikan kepada lembaga-lembaga kepustakaan dan pihak lain yang memberikan berbagai informasi dalam mencari sumber penulisan.

Besar harapan mudah-mudahan penulisan studi pustaka ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan setiap pembaca.

Atas segala bantuan, bimbingan dan nasehat serta budi baik yang diberikan kepada penulis, senantiasa mendapat balasan yang berlipat ganda.

Jakarta, Pebruari 1995
Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Permasalahan	3
3. Tujuan Penulisan	4
4. Metode Penulisan	4
BAB II. PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA	
A. Program KB Nasional	5
B. Program Keluarga Berencana di Desa	8
C. Kontrasepsi	10
BAB III. UNSUR-UNSUR PENGELOLA KELUARGA BERENCANA DESA	
1. Pengertian dan Ciri-ciri Pengelola Keluarga Berencana Desa	12
2. Bentuk Keikutsertaan Pengelola Keluarga Berencana Desa	15
3. Fungsi Pengelola Keluarga Berencana Desa	19
4. Peranan Pengelola Keluarga Berencana Desa	20
5. Sasaran Pengelola Keluarga Berencana Desa	23
BAB IV. USAHA PEMERINTAH DALAM MEMBINA PENGELOLA KB DESA	
A. Pembinaan Pengelola KB Desa Melalui Kegiatan Pelatihan	25
B. Lembaga Pemerintah yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana	29
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	
1. Kesimpulan	30
2. Saran-saran	32
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual. Di samping itu, pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan manusia seutuhnya berarti membangun insan Indonesia yang selaras, serasi dan seimbang lahir dan batin antara kemajuan bidang material dan spiritual (GBHN,1993).

Untuk lebih memberikan arah bagi perwujudan cita-cita pembangunan setiap sektor dan tahap pembangunan, harus direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu yang didukung dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tepat guna dan terkoordinasi satu sama lain. Dalam setiap usaha pembangunan di Indonesia, perkembangan penduduk yang berlangsung dengan cepat merupakan salah satu masalah pokok di bidang kependudukan. Dari hasil sensus penduduk diketahui bahwa reit perkembangan penduduk Indonesia dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 adalah 1.97 persen per tahun (BPS,1993). Bila perkembangan penduduk ini tetap dibiarkan pada tingkat yang tinggi, maka tanpa pengendalian yang segera, akan mempersulit usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat di berbagai bidang. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan, pertimbangan mengenai pengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk memperoleh tempat yang cukup penting.

Faktor kelahiran yang tinggi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk Indonesia, sehingga untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha penurunan tingkat kelahiran (Said Rusli, 1983). Salah satu usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah kependudukan, terutama dalam hal pengendalian angka fertilitas adalah pelaksanaan program keluarga

berencana. Program ini telah berjalan sejak tahun 1970, yang dimulai di propinsi-propinsi Jawa dan Bali.

Program keluarga berencana merupakan usaha langsung yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan cara membatasi serta menunda kelahiran melalui penggunaan alat kontrasepsi secara luwes dan berkesinambungan. Program keluarga berencana yang sudah menunjukkan hasil-hasil yang positif selama ini perlu diperluas, diintensifkan dan dipercepat pelaksanaannya.

Dalam Repelita V pelaksanaan program Keluarga Berencana ditujukan antara lain untuk membantu tercapainya sasaran penurunan tingkat kelahiran, meningkatkan jumlah peserta KB, meningkatkan peran serta tanggung jawab keluarga dan masyarakat dalam pengelolaan program keluarga berencana, meluaskan dan mengintensifkan program KB di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan di awal Repelita VI pada PJPT II ini, program keluarga berencana nasional diarahkan untuk membangun keluarga kecil sejahtera yang makin mandiri, setiap keluarga diharapkan ikut serta secara aktif membangun keluarganya sendiri sejak dini. Untuk itu seluruh masyarakat secara sadar harus lebih bertanggung jawab terhadap program keluarga berencana pada keluarganya.

Unsur-unsur pengelola KB Desa merupakan unsur pelaksana program KB Nasional di tingkat desa yang berfungsi sebagai motivator. Adapun unsur-unsur pengelola keluarga berencana desa adalah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), tokoh masyarakat, kepala desa serta institusi masyarakat.

Dengan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dan meningkatnya kemandirian masyarakat, serta meluasnya keterpaduan kegiatan-kegiatan program KB Nasional, maka peningkatan kualitas pelayanan oleh pengelola KB terus dilaksanakan, karena keberhasilan program KB Nasional tidak terlepas dari peranan yang dibawakannya. Untuk mencapai keberhasilan program KB di desa diperlukan pengembangan potensi kepemimpinan adalah sebagai suatu proses dalam mempengaruhi individu-individu di dalam berbagai situasi tertentu. Kepemimpinan tersebut merefleksikan kemampuan

yang dimiliki oleh pemimpin untuk mempengaruhi tindakan orang lain, khususnya membantu kelompok dalam menentukan respon yang diinginkannya sehingga mereka mau menjalankannya secara sukarela (Mugniesyah, 1986). Sama halnya dengan Herujito (1988), yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi perilaku manusia dan untuk mengendalikan orang-orang dalam organisasi agar perilaku mereka sesuai dengan perilaku yang diinginkan oleh pemimpin. Seseorang dapat disebut pemimpin jika orang tersebut dapat mempengaruhi orang lain dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Lewin, Lippit dan White dalam Goldberg (1985) membagi tiga gaya kepemimpinan yaitu gaya *otoriter*, *demokratis*, dan *laissez faire*. Gaya kepemimpinan *otoriter* adalah pemimpin lebih cenderung menentukan kebijaksanaan kelompok tanpa berkonsultasi dulu pada anggota kelompok. Komunikasi dalam kelompok dilakukan melalui pemimpin, para anggota tidak dianjurkan untuk berkomunikasi secara langsung. Gaya kepemimpinan *demokratis* adalah pemimpin yang mampu mengarahkan diri sendiri dan berusaha menyajikan kepada pengikutnya suatu kesempatan untuk tumbuh, berkembang dan bertindak sendiri. Gaya kepemimpinan *laissez faire* adalah pemimpin selalu berusaha menghindari suatu tanggung jawab terhadap para pengikutnya.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan para pengelola KB desa harus menjadi pemimpin yang mendukung komunikasi diantara para anggota kelompok dengan cara mendorong mereka untuk menentukan sendiri kebijaksanaan dan kegiatan kelompok, jadi ada suatu kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Pemimpin seperti ini menurut penelitian Lewin, Lippit dan White dapat digolongkan dalam gaya kepemimpinan demokratis.

2. Permasalahan

Partisipasi semua unsur masyarakat dengan kerjasama sukarela merupakan kunci utama bagi keberhasilan pembangunan. Pembangunan

diarahkan untuk mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia dan alam, termasuk mendayagunakan pemimpin di desa dan agen peubah lainnya. Salah satu diantaranya adalah pengelola program keluarga berencana di desa.

Keberhasilan program keluarga berencana tidak lepas dari peranan pengelola keluarga berencana desa yang berpartisipasi bagi penyebaran program keluarga berencana. Peranan kepemimpinan yang dibawakannya menentukan keberhasilan usaha penyebaran program keluarga berencana di desa.

Sehubungan dengan program keluarga berencana desa tersebut maka permasalahan yang perlu ditelaah adalah:

1. Sejumlah keikutsertaan atau peranan pengelola keluarga berencana desa dalam meningkatkan program keluarga berencana di pedesaan ?
2. Sejauhmana peranan pemerintah dalam membina pengelola program keluarga berencana desa ?

3. Tujuan Penulisan

Penulisan studi pustaka ini bertujuan:

1. Mengetahui peranan pengelola keluarga berencana desa dalam meningkatkan program keluarga berencana di pedesaan
2. Mengetahui usaha yang dilakukan pemerintah dalam membina para pengelola program keluarga berencana desa.

4. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan studi pustaka ini adalah berdasarkan penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang menjadi topik dari studi pustaka ini. Bahan-bahan kepustakaan ini bersumber dari buku-buku dan laporan penelitian yang ada di beberapa perpustakaan dan perpustakaan di instansi lain, misalnya BKKBN.

BAB II. PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA

Sejarah program KB di Indonesia secara formal diawali keikutsertaan Presiden Soeharto menandatangani Deklarasi PBB tentang Kependudukan (*United Nations Declaration on Population*) yang diikuti dengan berdirinya Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) pada tahun 1969. Pada tahun 1970, LKBN berubah menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang sekaligus mengubah statusnya dari lembaga semi Pemerintah menjadi lembaga yang dikelola secara penuh oleh pemerintah.

Sejak itu, program keluarga berencana telah mengalami berbagai perkembangan yang menarik. Salah satu perkembangan yang erat hubungannya dengan perkembangan keluarga berencana adalah disahkannya RUU kependudukan dari Pembangunan Keluarga Sejahtera sebagai *Undang-undang Nomor 10 tahun 1992*. Disahkannya UU Kependudukan ini menggambarkan bahwa program KB Nasional merupakan suatu tujuan pembangunan yang harus disukseskan oleh Bangsa Indonesia.

A. Program KB Nasional

Pembangunan program keluarga berencana nasional dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama, telah berhasil meletakkan landasan bagi proses pengembangan dan pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. Secara demografis, hasil Sensus Penduduk memperlihatkan telah terjadi penerunan Laju Pertumbuhan Penduduk dari 2.32 persen pada periode 1971-1980 menjadi 1.97 persen pada periode 1980-1990.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin rendah tersebut adalah dampak semakin bertambahnya jumlah peserta keluarga berencana dari tahun ke tahun berikutnya, serta semakin meningkatnya peranan dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan program KB Nasional (BKKBN, 1991).

Dari keberhasilan penurunan tingkat kelahiran tersebut, Indonesia dapat menekan ledakan jumlah penduduk, sehingga dengan kondisi seperti itu usaha peningkatan kualitas penduduk akan mudah tercapai, karena penyediaan sarana hidup dengan jumlah penduduk menjadi seimbang. Oleh karena itu program keluarga berencana nasional penting bagi usaha peningkatan kualitas hidup penduduk yang merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program keluarga berencana dilakukan suatu pendekatan yang mengarah kepada pengalihan tanggung jawab pengelola dari pemerintah kepada masyarakat, pengembangan pelayanan dan pengayoman terhadap sasaran serta peningkatan daya guna dan hasil guna dari pengelola program.

Selaku badan koordinasi, tugas pokok Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional adalah mengkoordinasi program dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian (BKKBN, 1994). Pelaksanaan program keluarga berencana telah dilakukan dengan dua cara. Pertama, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yaitu melalui penerangan massa, penerangan kelompok serta penerangan tetap muka. Adapun upaya-upaya KIE dilaksanakan adalah untuk menciptakan perilaku masyarakat, keluarga dan individu yang mengubah posisi kesertaannya karena ajakan dan motivasi menjadi kesertaan yang tumbuk dari kesadaran pribadi. Oleh karena itu, maka program KIE dilaksanakan untuk memberikan informasi tentang kemudahan, kelancaran dan keuntungan bagi peserta KB. Supaya program KB dapat melembaga, kegiatan penyuluhan KB dilakukan dengan menggunakan semua saluran komunikasi yang ada, baik secara interpersonal yakni para pengelola itu sendiri dan melalui media massa seperti TV, radio, majalah, surat kabar atau media cetak lainnya. Kedua, Pelayanan kontrasepsi yaitu melalui klinik-klinik keluarga berencana dan rumah sakit-rumah sakit. Adapun tujuan dari pelayanan kontrasepsi ini adalah: (1) Meningkatkan dan memantapkan penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, (2) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendatangi tempat-tempat pelayanan kontrasepsi, (3) Meningkatkan partisipasi pria

dalam pemakaian alat kontrasepsi dan mendorong kesediaannya dalam memotivasi isteri mereka agar berkeluarga berencana secara aktif, (4) Mengembangkan dan memantapkan pola pemakaian kontrasepsi yang rasional (tabel.1), dan (5) Menjamin agar kualitas kontrasepsi yang sebaik-baiknya sampai di tangan konsumen.

Sampai akhir Pelita V data menunjukkan bahwa jumlah peserta KB baru adalah sebesar 21.137.327 peserta. Secara keseluruhan, jumlah peserta KB Baru selama lima pelita sebesar 71.634.005 peserta atau 99.8% dari seluruh sasaran yang telah ditetapkan (BKKBN,1993), (Lampiran 2).

Untuk mencapai tujuan program yaitu mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk dan dihayatinya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera maka perlu adanya suatu kebijaksanaan nasional. Kebijaksanaan Program KB Nasional diarahkan pada pengembangan penduduk dan keluarga sebagai potensi sumber daya manusia yang tangguh agar mampu mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk agar dapat dicapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan keluarga.

Dalam rangka menterjemahkan kebijaksanaan tersebut dalam bentuk kegiatan operasional, program kependudukan keluarga berencana menganut strategi yang diformulasikan ke dalam (1) panca karya dan (2) tersedianya serta terlaksananya dukungan yang memadai dalam metode, tenaga, sarana dan dana.

Strategi panca karya bertujuan untuk (a) mendorong pasangan usia subur yang isterinya belum berusia 30 tahun dan atau jumlah anak kurang 3 orang agar mempunyai anak maksimal 2 orang, (b) membantu pasangan usia subur yang isterinya berusia lebih dari 30 tahun atau anaknya lebih 3 orang agar tidak menambah jumlah anak sehingga mereka mampu berkaya, (c) mengarahkan generasi muda untuk menghayati norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera (NKKBS) sebagai cara hidup yang layak dan bertanggung jawab, (d) memperkuat proses pelembagaan secara fisik dalam usaha KB,

(e) memperkuat proses pelebagaan yang bersifat mental spritual dan lebih bersifat dukungan psikologis, untuk membantumemberikan isi keyakinan mental dan memberi ketenangan batin bagi peserta KB (BKKBN, 1993).

Arah kebijaksanaan dan strategi ini adalah berfungsi untuk menyelesaikan perkiraan pemenuhan kebutuhan peserta KB baru maupun KB aktif dan penyebarluasan pelebagaan kependudukan serta pembangunan keluarga sejahtera. Untuk menunjang keberhasilan operasional pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera sebagaimana diamanatkan UU No.10/1992, program dan kegiatan yang diprioritaskan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional adalah: (1) Pendataan keluarga sejahtera, (2) Pengembangan kependudukan, (3) Kerjasama internasional, diantaranya:

- a. Sebagai hasil keputusan KTT kelompok 15 di Kuala Lumpur dan Caracas, Indonesia ditunjuk sebagai pengambil inisiatif
- b. Indonesia dipercaya mewakili Asia dalam pembentukan suatu komisi internasional untuk mempersiapkan konfrensi kependudukan dunia 1994
- c. Tahun 1992 Indonesia menyelenggarakan pertemuan kependudukan Asia-Pasifik IV, tentang usaha mengembangkan kebijaksanaan dan strategi kependudukan dan pembangunan berkelanjutan memasuki abad 21, dan kerjasama lainnya.

Melihat perkembangan dan keberhasilan ini maka beban yang lebih berat akan dihadapi di masa mendatang, selain memelihara keberhasilan yang telah dicapai, dituntut untuk mengembangkan fungsi dan tugas agar dapat menyesuaikan diri dengan gerakan masyarakat, selaras dengan amanat UU No.10 tahun 1992.

B. Program Keluarga Berencana di Desa

Pengelola program keluarga berencana di tingkat desa sangat mempengaruhi keberhasilan tujuan program keluarga berencana nasional. Dalam program keluarga berencana nasional peranan

masyarakat yang dari waktu ke waktu semakin berkembang, baik jumlah maupun aktivitas dan peranannya. Upaya menumbuhkan institusi masyarakat merupakan suatu proses yang cukup panjang dan memerlukan persiapan yang matang, agar warga masyarakat dapat tersentuh hati, bahwa program keluarga berencana nasional merupakan suatu tuntutan. Selain itu pula upaya ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penggarapan program keluarga berencana pada tingkat kecamatan dan desa.

Dalam kerangka inilah penumbuhan institusi tersebut dilakukan melalui pertemuan desa yang disebut musyawarah masyarakat desa, rembug desa ataupun sebutan lainnya.

Guna mencapai hasil kegiatan yang optimal maka jalannya kegiatan ditingkat desa/kelurahan harus berjalan dalam suatu mekanisme kegiatan. Mekanisme kegiatan yang telah baku ini pada akhirnya akan dilaksanakan oleh para pengelola dan pelaksana program KB Nasional di tingkat desa.

Secara rinci Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional merumuskan mekanisme kegiatan program KB di desa sebagai berikut: (1) kepala desa menerima rencana kegiatan dari kecamatan yang merupakan hasil Rakor KB Kecamatan, (2) berdasarkan rencana tersebut, maka kepala desa bersama PLKB mempersiapkan pelaksanaan Rakor Desa, (3) Rakor Desa merupakan forum kesepakatan rencana kegiatan dalam rangka perpaduan kegiatan antar petugas, baik dalam rangka komunikasi, informasi dan edukasi maupun pelayanan dengan kegiatan institusi masyarakat, (4) persiapan desa merupakan upaya penerangan motivasi oleh PLKB, tokoh masyarakat dan institusi dalam rangka mencari peserta KB baru, membina peserta KB lama dan pelaksana integrasi yang akan dilayani oleh petugas, (5) kegiatan institusi masyarakat adalah kegiatan institusi yang berkaitan dengan persiapan desa dalam rangka mempersiapkan pelayanan, (6) pelayanan medis bisa dilaksanakan secara terpadu dengan program kesehatan di posyandu atau melalui kegiatan TKBK yang hanya melayani peserta KB, (7) pencatatan

hasil pelayanan oleh PLKB bersama institusi dalam PUS dan peserta KB (BKKBN, 1986), (Lampiran 5)

Selain ketujuh tahapan kegiatan tersebut, maka PLKB perlu mengadakan pendekatan secara non formal sehingga PLKB dapat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat serta terjadi hubungan erat antara PLKB dengan kepala desa, serta tokoh masyarakat lainnya.

C. Kontrasepsi

Program KB merupakan usaha langsung yang bertujuan mengurangi tingkat kelahiran melalui penggunaan cara kontrasepsi. Berhasil tidaknya pelaksanaan program KB akan menentukan pula berhasil tidaknya pelaksanaan usaha mewujudkan kesejahteraan bagi Indonesia (Kurniawati, 1984). Yang dimaksud dengan *kontrasepsi* adalah alat atau cara yang digunakan untuk menghindari/mencegah terjadinya kehamilan (Depkes, 1991). Pada umumnya cara/metode kontrasepsi dapat dibagi menjadi: (1) metode sederhana, yaitu tanpa alat/obat dan dengan alat/obat kondom, diafragma atau cap yalli dan cairan berbusa, serta tablet berbusa, (2) metode efektif, yaitu dengan pil KB, AKDR (Alat kontrasepsi dalam rahim)/IUD, suntikan KB, dan susuk KB, (3) metode mantap dengan cara operasi yaitu tubektomi (pada wanita) dan vasektomi (pada pria).

Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan pola perencanaan keluarga dengan baik maka diperlukan penggunaan kontrasepsi yang rasional yang sifatnya sesuai dengan ciri-ciri setiap masa (periode) perencanaan keluarga tersebut (tabel 1).

Tabel 1. Bagan Penggunaan Kontrasepsi Yang Rasional

Masa Menunda Kesuburan (Kehamilan)	Masa Mengatur Kesuburan (Menjarangkan Kehamilan)		Masa Mengakhiri Kesuburan (Tidak hamil lagi)	
I	IIa	IIb	IIIa	IIIb
	3 - 4 tahun			
	20 thn		30 thn	35 thn
- Pil	-AKDR	-AKDR	-Kontrasepsi Mantap	-Kontrasepsi Mantap
- AKDR	-Pil	-Suntikan	-Susuk KB	-AKDR
- Cara sederhana	-Suntikan	-Susuk KB	-AKDR	-Susuk KB
	-Cara sederhana	-Pil	-Suntikan	-Suntikan
		-Cara sederhana	-Pil	-Cara sederhana
			-Cara sederhana	-Pil

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 1 menunjukkan bagaimana perencanaan keluarga menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera:

1. Masa menunda kehamilan bagi pasangan usia subur dengan isteri usia dibawah 20 tahun, dianjurkan untuk menunda kehamilannya. Kontrasepsi yang disarankan adalah pil disusul AKDR, dan cara sederhana.
2. Masa mengatur kesuburan (*menjarangkan kehamilan*) periode usia isteri antar 20-30 tahun merupakan periode usia yang paling baik untuk melahirkan dengan jumlah anak dua orang dan jarak antara kelahiran anak 2-3 tahun. Kontrasepsi yang disarankan adalah AKDR, disusul pil/suntikan, cara sederhana dan susuk KB.
3. Masa mengakhiri kesuburan (*tidak hamil lagi*) periode usia isteri di atas 30 tahun sebaiknya mengakhiri kesuburan setelah mempunyai anak 2 orang. Kontrasepsi yang disarankan adalah

kontrasepsi mantap, disusul susuk KB, AKDR, pil dan cara sederhana.

Ditinjau dari perkembangan penggunaan metode kontrasepsi hingga Pelita V, menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (1993) peserta KB baru berkisar pada pil 45.5%, suntikan 23.3% dan IUD 20.3% (lampiran 5). Sedangkan peserta KB aktif berkisar pada pil 32.6% dan IUD 24.5%, selanjutnya peminat kontrasepsi lainnya berangsur-angsur mengalami peningkatan yang cukup berarti misalnya kontrasepsi suntikan 28.4% (lampiran 4). dari data ini terlihat bahwa para peserta KB lebih menyukai alat kontrasepsi pil, hal ini disebabkan karena alat kontrasepsi pil mempunyai keuntungan dimana sangat efektif dan juga tidak mengganggu senggama (Depkes, 1991).

Pilihan kontrasepsi sangat ditentukan oleh pengetahuan akseptor akan kontrasepsi tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan mutu pelayanan KIE medis oleh petugas kepada calon akseptor, yang pada gilirannya ditentukan oleh tingkat pendidikan serta latar belakang sosial budaya. Tetapi yang menjadi prinsip adalah norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Bila prinsip ini dihayati maka untuk melaksanakan prinsip ini, penggunaan kontrasepsi apapun dapat diterima, karena kontrasepsi apapun yang digunakan dengan cara yang benar adalah jauh lebih aman daripada tidak menggunakan kontrasepsi sama sekali.

BAB III. UNSUR-UNSUR PENGELOLA KB DESA

1. Pengertian dan Ciri-ciri Pengelola KB Desa

Pengertian pengelola keluarga berencana desa dapat dijelaskan dengan menelaah terlebih dahulu definisi dari pengelola desa itu sendiri. Pengelola desa menurut Soerjono Soekanto (1987) adalah seseorang yang mampu berperan sebagai

pemimpin, mau mengelola dan menggerakkan aktivitas-aktivitas yang ada di masyarakat, serta memberikan arahan motivasi secara terarah dan jelas. Sama halnya dengan Buddy Prasadja (1974), yang mengatakan bahwa pengelola desa adalah pemimpin-pemimpin desa baik formal maupun informal, seperti kepala desa dan tokoh masyarakat, juga institusi-institusi masyarakat yang secara sukarela mau berperan aktif dalam mengelola dan membangun desanya demi kepentingan orang banyak. Berdasarkan pendapat di atas maka seorang pengelola desa dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin yang secara sukarela mau mengelola dan menggerakkan aktivitas-aktivitas yang ada di masyarakat, serta memberikan arahan dan motivasi secara terarah dan jelas, yang bertujuan untuk membangun desanya demi kepentingan orang banyak. Mengacu dari pengertian pengelola desa tersebut maka pengelola keluarga berencana desa adalah seseorang yang mampu menjadi pemimpin, yang secara sukarela mau mengelola dan menggerakkan program keluarga berencana yang ada di desanya.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menekankan bahwa pengelola keluarga berencana desa adalah orang yang mampu memimpin secara sukarela, mau membina dan mengajak warganya untuk berpartisipasi dalam program keluarga berencana. Seorang pengelola harus menjadi panutan bagi masyarakatnya dan secara langsung menangani program KB dan juga mampu meyakinkan masyarakat tentang pentingnya program KB bagi kehidupan masyarakat itu sendiri (BKKBN, 1986). Dengan demikian, pengelola keluarga berencana desa diharapkan mampu menjadi pemimpin dikalangan masyarakat desa dan berperan sebagai pengendali operasional program KB Nasional di tingkat desa.

Pemimpin menurut Herujito (1988) dapat diartikan sebagai individu yang memiliki program atau rencana dan bersama-sama anggota bergerak untuk mencapai tujuan dengan cara yang pasti. Sedangkan kepemimpinan adalah suatu proses dalam mempengaruhi individu-individu di dalam berbagai situasi. Kepemimpinan tersebut merefleksikan kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin

untuk mempengaruhi tindakan orang lain khususnya membantu kelompok dalam menentukan respon yang dinginkannya sehingga mereka mau menjalankannya secara sukarela (Mugniesyah, 1986).

Mengacu pada pengertian pemimpin dan kepemimpinan tersebut, pengelola keluarga berencana desa dituntut dapat mengembangkan potensi kepemimpinannya dengan memantapkan dukungan dari masyarakat desa.

Pengelola menurut Mahmudin (1983) dapat dikatakan sebagai pemimpin yang baik terhadap masyarakat di desanya apabila mereka sanggup: (1) Menganalisa tujuan kelompok, (2) Membentuk struktur kelompok, (3) Mengambil inisiatif, (4) Menggerakkan kelompok, (5) Memungkinkan adanya komunikasi yang efektif dalam kelompok, (6) Mengompakkan kelompok, (7) Memuaskan kelompok, dan (8) Mengkoordinir kelompok.

Menurut Sugarda (1983) unsur-unsur pengelola yang sanggup bertanggung jawab sebagai pemimpin sekelompok masyarakat haruslah memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan orang-orang yang dipimpinnya, karena dengan adanya ciri-ciri yang berbeda inilah seseorang dapat melaksanakan fungsi kepemimpinannya. Oleh karena itu Sugarda menyebutkan bahwa ciri-ciri pengelola adalah:

1. Lebih terbuka terhadap media massa
2. Lebih bersifat kosmopolit
3. Lebih sering melakukan kontak dengan orang-orang pembawa perubahan
4. Memiliki tingkat partisipasi sosial yang lebih tinggi
5. Memiliki status sosial yang lebih tinggi
6. Lebih mudah menerapkan pembaharuan (*inovasi*)
7. Penglihatan sosial yang lebih tajam, dalam hal ini seorang pengelola lebih cepat dapat melihat, memahami akan perasaan-perasaan, sikap-sikap dan kebutuhan anggotanya
8. Kecerdasan dan kecakapan yang lebih tinggi
9. Kestabilan emosi yang lebih mantap dalam arti lebih mampu mengendalikan emosi/perasaan.

2. Bentuk Keikutsertaan Pengelola KB Desa

Adjid (1985) mengemukakan bahwa ikutsertanya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan dalam memanfaatkan serta menikmati hasil-hasil pembangunan yang nyata dapat dikatakan sebagai suatu partisipasi dari masyarakat. Keikutsertaan ini timbul karena adanya suatu kemampuan dari masyarakat untuk bertindak dalam keberhasilan yang teratur untuk menanggapi kondisi lingkungan, sehingga masyarakat tersebut dapat bertindak sesuai dengan logika dari yang dikandung oleh kondisi lingkungan tersebut.

Ikut sertanya pengelola berpartisipasi dalam program keluarga berencana merupakan suatu bukti keberhasilan Bangsa Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya manusianya. Bentuk-bentuk keikutsertaan para pengelola program keluarga berencana desa diantaranya pendataan PUS, penerangan dan motivasi, pembinaan, pelayanan teknis serta evaluasi.

Pendataan PUS yang merupakan salah satu kegiatan para pengelola KB Desa adalah suatu proses kegiatan pengumpulan, pencatatan dan penyajian data. Singarimbun (1987) mengatakan pengumpulan data berguna untuk menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dan juga dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin.

Teknik-teknik yang dipergunakan dalam mengumpulkan data menurut Hadari Nawani (1983) ada enam teknik, yaitu: (1) teknik *observasi langsung*, data dikumpulkan melalui pengamatan dan pencatatan langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi, (2) *observasi tidak langsung*, data dikumpulkan melalui pengamatan dan pencatatan tidak langsung di tempat, keadaan atau situasi itu terjadi, (3) teknik *komunikasi langsung* adalah dengan cara mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka dengan sumber data, (4) teknik *komunikasi tidak langsung* adalah data yang dikumpulkan dengan mengadakan hubungan atau dengan perantara baik berupa alat yang sudah tersedia maupun alat khusus yang dibuat untuk keperluan itu, (5) teknik *pengukuran* adalah mengumpulkan data yang bersifat

kuantitatif untuk mengetahui tingkat atau derajat tertentu sebagai suatu ukuran yang relevan, (6) teknik studi *dokumenter/bibliografi*, mengumpulkan data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis, misalnya dari sumber dokumen maupun buku-buku, dan lain-lain.

Pendataan pada tahun 1994 berorientasi kepada pendataan keluarga sejahtera (BKKBN, 1994). Karena dari hasil pendataan tersebut dapat menjaring berbagai indikator dari profil keluarga di Indonesia dan atau kondisi keluarga sejahtera di Indonesia. Dengan demikian akan semakin mudah bagi pengelola untuk melihat bagaimana keadaan masyarakat desa dan juga akan memudahkan para pengelola program keluarga berencana desa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keluarga berencana seperti penerangan dan motivasi.

Kegiatan pengelola program keluarga berencana desa selain pendataan adalah penerangan dan motivasi yaitu, suatu proses penyampaian pesan kepada sasaran dalam rangka menanamkan pengertian dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, agar mengerti dan mau melaksanakannya (Thomas dalam Wiriaatmadja, 1983). Keikutsertaan pengelola dalam usaha penerangan dan motivasi, salah satunya dilakukan melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan penyuluhan seorang penyuluh harus mengetahui dimana dapat memperoleh pengetahuan yang akan disuluhkan, mengetahui cara atau metode penyuluhan dengan mengenal sifat-sifat para sasaran, bahasa dan istilah-istilah yang mereka biasa pergunakan, dan juga mengetahui teknik berkomunikasi (Wiriaatmadja, 1983). Tetapi berhasilnya usaha penyuluhan bukan saja tergantung pada kecakapan teknik dari para penyuluhnya, melainkan pada caranya bergaul dengan rakyat serta menginsyafkannya, bahwa cara yang disarankan itu menguntungkan (Teko Soemodiwirjo dalam Wiriaatmadja, 1983).

Adapun tujuan dari penyuluhan pada dasarnya adalah untuk merubah perilaku individu dan masyarakat, agar mereka mau menerima dan *mengadopsi inovasi KB*. Suatu inovasi seringkali menuntut adanya perubahan gaya hidup. Perubahan yang terjadi mungkin menyangkut pola berpikir, pola bersikap maupun pola bertindak dari individu dan masyarakat. Beberapa hasil studi dari lapangan menunjukkan pula adanya perbedaan kualitas pada pola berpikir, pola bersikap, maupun pola bertindak (*perilaku*). Perbedaan kualitas perilaku individu ini dipengaruhi oleh faktor kebudayaan seperti ekonomi, pendidikan ataupun kepercayaan dan faktor psikologis dari individu itu sendiri (Eddy Riyanto, 1989).

Yang dimaksud dengan perubahan-perubahan dari tujuan penyuluhan di atas adalah supaya sasaran lebih terbuka untuk menerima hal-hal baru. Karena itu proses perubahan-perubahan ini akan membutuhkan waktu yang agak lama. Apabila sasaran telah mengalami suatu perubahan dalam hidupnya, maka dia dapat dikatakan telah melaksanakan anjuran-anjuran penyuluh, oleh karena itu telah berlangsung suatu proses mental pada dia, proses mental ini disebut proses *adopsi*. Tahap-tahap proses *adopsi* ini menurut Wiriaatmadja (1983) adalah sebagai berikut:

- a. Tahap kesadaran atau penghayatan (*awareness*), sasaran sudah maklum atau menghayati sesuatu hal yang baru
- b. Tahap minat (*interest*), sasaran mulai ingin mengetahui lebih banyak perihal yang baru
- c. Tahap penilaian (*evaluation*), sasaran mulai berpikir dan menilai keterangan perihal yang baru tersebut
- d. Tahap percobaan (*trial*), sasaran sudah mulai mencoba-coba dalam luas dan jumlah yang sedikit atau kecil saja
- e. Tahap penerimaan (*adoption*), sasaran sudah yakin akan kebenaran atau keunggulan hal yang baru itu.

Mengacu dari tujuan penyuluhan yang telah dikemukakan di atas maka penyuluhan dalam pelaksanaan program KB adalah juga merupakan salah satu proses komunikasi tentang ide-ide baru

sehingga komunikasi menjadi berubah perilakunya dan kemudian dengan kesadarannya sendiri bersedia menerapkan atau mempraktekkan ide-ide tersebut di dalam kegiatannya sehari-hari.

Untuk mendukung kelancaran penyuluhan program keluarga berencana desa maka diupayakan adanya suatu pelayanan teknis yaitu suatu kegiatan yang memberikan kemudahan kepada sasaran dalam hal bantuan teknis, misalnya pelayanan kontrasepsi kepada calon akseptor. Maksud dan tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan secara mudah, murah, cepat dan aman, serta untuk meningkatkan jumlah peserta KB aktif dengan menggunakan alat kontrasepsi efektif.

Pada saat pelayanan teknis dilakukan para pengelola juga memberikan pembinaan kepada calon-calon akseptor. Pembinaan dalam arti para pengelola membimbing, mengarahkan dan mengaktifkan peserta keluarga berencana supaya mau berperan aktif dan menjadi pelaksana dan pengelola program keluarga berencana.

Sebagai kegiatan akhir dari proses pelaksanaan program keluarga berencana desa adalah evaluasi, yaitu suatu proses *feedback* dimana hasil yang telah diperoleh selama pelaksanaan diperbandingkan dengan rencana dan keadaan semula. Menurut Wiriaatmadja (1983) evaluasi bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran kemajuan usaha untuk mencapai tujuan, dan menjelaskan lagi apa tujuan itu
2. Memperoleh keterangan perihal keadaan masyarakat
3. Mengukur efektifitas dan metode-metode penyuluhan yang dipergunakan
4. Menentukan arah penyempurnaan pekerjaan.

Sedangkan menurut Chitambar (1961) kegunaan evaluasi adalah:

1. Membantu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan/kegagalan
2. Membantu mengkaji maksud dari kegiatan-kegiatan
3. Membantu mengkaji seluruh program

4. Membuat supaya penyuluh/pelaksana merencanakan sesuai kemampuan
5. Meningkatkan kepercayaan kepada penyuluh
6. Mengetahui kemajuan dari program yang dilaksanakan
7. Melihat efisiensi
8. Membuktikan kepada masyarakat terlaksananya keberhasilan dan kegagalan suatu proyek.

Berdasarkan pendapat Wiriaatmadja dan Chitambar di atas terlihat bahwa evaluasi adalah sesuatu yang efektif dan mendatangkan kegunaan serta mempunyai tujuan yang jelas dan terdefinisi. Oleh karena itu dalam pelaksanaan program keluarga berencana sangatlah penting dilakukan evaluasi yaitu untuk melihat keberhasilan maupun kegagalan program tersebut.

3. Fungsi Pengelola Keluarga Berencana Desa

Dilihat dari keikutsertaan para pengelola keluarga berencana desa menunjukkan bahwa keterlibatan pengelola ini sudah ada sejak lama seiring dengan tumbuhnya program keluarga berencana itu sendiri. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sebagai pelindung program keluarga berencana nasional telah merumuskan bahwa pengelola program keluarga berencana desa berfungsi sebagai motivator program keluarga berencana di desanya meliputi: (1) Mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi terhadap program keluarga berencana, baik sebagai pengelola maupun ikut menjadi peserta keluarga berencana aktif, (2) Mendorong dan membantu masyarakat dan keluarga yang ingin datang ke tempat pelayanan-pelayanan keluarga berencana, (3) Mendorong masyarakat dan keluarga untuk membangun keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia, Mendorong atau menggerakkan masyarakat dan keluarga dalam membangun keluarga kecil yang mandiri (BKKBN, 1993).

Dari fungsi yang dibawahnya ini jelas terlihat bahwa pengelola program keluarga berencana desa merupakan suatu modal penting dalam menunjang keberhasilan keluarga berencana. Dengan demikian sangat perlu ditingkatkan kepemimpinan mereka.

4. Peranan Pengelola Keluarga Berencana Desa

Pelaksanaan program KB Nasional di tingkat desa, dilakukan oleh para pengelola dan petugas program, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pemantauan. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan secara sistematis serta saling kait mengkait satu dengan yang lainnya sehingga merupakan suatu perpaduan dan kegiatan untuk mencapai tujuan program itu sendiri. Para pengelola program ini merupakan institusi yang berperan dalam pelaksanaan program KB Nasional dalam rangka proses alih peran kepada masyarakat.

Kepala desa, institusi masyarakat, tokoh masyarakat dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai pengelola KB Desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam memajukan kelancaran program KB Nasional. Mereka adalah sebagai petugas dan pusat komando program keluarga berencana nasional di desa, sebagai penyuluh, sebagai motivator, sebagai sumber informasi atau sebagai tempat bertanya bagi masyarakat dan juga berperan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan masyarakat melalui wadah kegiatan agar dapat mengambil alih peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan program keluarga berencana.

Emelia Handayati juga mengatakan bahwa pengelola program keluarga berencana desa dapat berperan sebagai konselor dalam melaksanakan proses konseling. Menurut Donald G. Mortenson and Alan M. Schmuller dalam Emelia Handayani (1994); konseling dapat diartikan sebagai suatu proses hubungan seseorang dengan seseorang dimana yang seorang dibantu oleh orang lainnya untuk meningkatkan pengertian dan kemampuannya dalam menghadapi masalahnya. Kemudian C.H. Patterson yang diikuti oleh Bruce

Sherzter dan Shelly C. Stone dalam Emelia Handayani mengemukakan karakteristik yang terkandung dalam batasan *konseling* tersebut diantaranya: (1) Berhubungan dengan usaha mempengaruhi perubahan sebagian besar dari tingkah laku klien secara sukarela, (2) Kondisi yang memperlancar perubahan tingkah laku itu diselenggarakan melalui wawancara, (3) Orang-orang yang memerlukan bantuan itu pada umumnya mempunyai beberapa sumber dalam diri mereka sendiri untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya dan (4) Kesanggupan untuk menunjukkan sikap-sikap dan suasana seperti ikhlas, hangat dan simpati adalah hal-hal yang amat diperlukan (Emelia Handayani, 1994). Oleh karena itu proses konseling ini sangat baik untuk dilakukan untuk menambah wawancara masyarakat.

Dalam proses konseling ini pengelola berupaya membantu keluarga dalam pemahaman untuk menemukan dan mengatasi permasalahan dalam membangun keluarga sejahtera. Pelaksanaan konseling keluarga berencana ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keluarga mengenai pemahaman potensi dan meningkatkan kemandirian keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera.

Dari penjelasan di atas maka terlihat bahwa peranan pengelola keluarga berencana desa dalam usaha mengembangkan program keluarga berencana desa senantiasa mengacu pada fungsi pengelola yang dibawakannya yaitu sebagai motivator di desanya. Tetapi dalam menjalankan perannya sebagai pengelola keluarga berencana di desa, terkadang para pengelola ini menghadapi berbagai hambatan-hambatan. Faktor-faktor penghambat ini diantaranya: (1) Keterbatasan sarana dan dana bagi pengelola dalam menyebarkan gagasan keluarga berencana, (2) Kurangnya biaya operasional, (3) Tidak ada alat peraga untuk melakukan penyuluhan, (4) Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dan (5) Kurangnya dukungan dari masyarakat itu sendiri (BKKBN, 1994).

Menurut pendataan pada bulan Januari 1993, menunjukkan bahwa total institusi masyarakat sebagai pengelola program keluarga berencana desa hampir satu juta institusi yang terdiri dari

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub PPKBD dan Kelompok Akseptor. Jumlah tersebut untuk PPKBD sebanyak 71.053 yang terinci 6.290 merupakan institusi awal, 22.798 institusi dasar, 29.596 institusi pengembangan dan 12.369 institusi mandiri. Sedangkan untuk Sub PPKBD yang berjumlah 293.680 yang terinci 47.064 institusi awal, 100.387 institusi dasar, 105.457 institusi pengembangan dan 40.772 institusi mandiri. Untuk jumlah kelompok akseptor sebesar 604.865 yang terdiri dari institusi mandiri 85.559, institusi pengembangan 207.544, institusi dasar 206.603 dan institusi kelompok akseptor awal sebesar 105.159 (Tabel 2).

**Tabel 2. Jumlah Institusi Masyarakat
(PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok Akseptor)
menurut pendataan bulan Januari 1993**

Kondisi	PPKBD	Sub PPKBD	Kelompok Akseptor	Total
Awal	6.290	47.064	105.159	158.513
Dasar	22.798	100.387	206.603	329.788
Berkembang	29.596	105.457	207.544	342.597
Mandiri	12.369	40.772	85.559	138.698
Total	71.053	293.680	604.865	969.596

Sumber: BKKBN 1994

Institusi yang termasuk klasifikasi awal adalah institusi yang ada pengurus dan telah melakukan kegiatan motivasi. Institusi yang termasuk klasifikasi dasar adalah yang sudah mempunyai pengurus dan telah melakukan kegiatan motivasi, pelayanan ulang dan rujukan, pertemuan rutin dan kegiatan pendataan PUS. Institusi yang termasuk klasifikasi pengembangan adalah institusi klasifikasi dasar yang telah melakukan kegiatan program integrasi. Sedangkan institusi yang termasuk klasifikasi mandiri adalah institusi masyarakat yang masuk klasifikasi pengembangan yang telah melaksanakan juga kegiatan pendanaan kelompok upaya kemandirian.

Dilihat dari kondisi institusi masyarakat yang ada seperti di atas dapat dikatakan bahwa institusi mempunyai sumbangan terhadap program KB Nasional bilamana institusi tersebut secara terus berperan dan berpartisipasi secara aktif.

5. Sasaran Pengelola KB Desa

Sejalan dengan tujuan program keluarga berencana yaitu pelembagaan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera sebagai pola hidup keluarga dalam rangka usaha mendukung keberhasilan program pembangunan manusia seutuhnya, yang sekaligus mendukung program pengendalian laju pertumbuhan penduduk, maka pelaksanaan program keluarga berencana diarahkan kepada dua bentuk sasaran yakni sasaran langsung dan sasaran tidak langsung.

Sasaran langsung yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) dari peserta KB, sedangkan sasaran tidak langsungnya meliputi Non-PUS yaitu anak-anak remaja dan orang tua (BKKBN, 1991). Dari PUS diharapkan menjadi peserta KB baru kemudian dilakukan pembinaan agar menjadi peserta KB lestari yang selanjutnya mencapai tujuan akhir dari program KB yaitu NKKBS dan akhirnya akan tercipta tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka dibuat tiga dimensi target yang meliputi:

1. Perluasan program, yaitu usaha untuk mengajak peserta KB baru sebanyak-banyaknya serta mengembangkan lembaga baru yang dikemudian hari diharapkan dapat turut mengelola program.
2. Pembinaan, yaitu usaha untuk lebih memantapkan penerimaan gagasan KB lestari.
3. Pelembagaan-Pembudayaan, yaitu usaha meningkatkan diterimanya NKKBS yang membudaya. Disini termasuk pula usaha untuk mengajak masyarakat dan aparat pemerintah dalam peran serta mengelola program KB secara mantap (BKKBN, 1991).

Selanjutnya untuk merealisasikan ketiga dimensi target yang telah dikemukakan di atas, maka dilaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang meliputi (Departemen Penerangan, 1990):

1. Penerangan dan motivasi, yang diharapkan dapat mendorong perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang KB
2. Pelayanan kontrasepsi
3. Penyediaan sarana dan prasarana KB

Penerangan dan motivasi dimaksudkan untuk merubah perilaku sasaran agar mau mengadopsi program keluarga berencana. Perubahan perilaku yang dikehendaki tersebut meliputi:

1. Perubahan pada tingkat pengetahuan (*Rana Kognitif*), yaitu perubahan perilaku yang berkenaan dengan aspek intelektualitas dan pengetahuan seseorang
2. Perubahan pada sikap (*Rana Afektif*), yaitu menyangkut masalah kebiasaan, perasaan dan emosi
3. Perubahan pada keterampilan tindakan (*Rana Psikomotorik*), yaitu yang berkenaan dengan tindakan seseorang dalam mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang telah diajarkan.

BAB IV. USAHA PEMERINTAH DALAM MEMBINA PENGELOLA KB DESA

Sehubungan dengan peningkatan kualitas pengelolaan terhadap program keluarga berencana desa dalam rangka meningkatkan program keluarga berencana nasional maka pemerintah mengambil peran sebagai pembina terhadap para pengelola-pengelola keluarga berencana di desa, dimana bertujuan supaya mereka dapat menjalankan segala kegiatan-kegiatan yang menyangkut program keluarga berencana yang ada di desa. Usaha pembinaan terhadap pengelola program keluarga berencana desa ini dilakukan dengan kegiatan pelatihan.

A. Pembinaan Pengelola KB Desa Melalui Kegiatan Pelatihan

Faktor pokok yang harus dipegang dalam pelaksanaan program keluarga berencana adalah adanya keterampilan dan pengetahuan yang prima dari tenaga pengelola program keluarga berencana. Hal ini berkaitan dengan strategi operasional program yang mendukung tenaga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sebagai petugas dan yang menyiapkan segala kegiatan yang akan dilakukan. Oleh karena itu maka para petugas dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang cukup tentang program keluarga berencana, misalnya melalui pelatihan ini.

Pelatihan adalah suatu proses yang membantu sasaran untuk memperoleh aktivitas dalam pekerjaan mereka sekarang atau yang akan datang melalui pengembangan kebiasaan-kebiasaan pikiran dan tindakan kecakapan, pengetahuan dan sikap yang profesional sesuai dengan kebutuhan lapangan. Macam-macam kegiatan pelatihan inipun disesuaikan dengan kebutuhan, biaya dan waktu pelatihan (Vitayala, 1987).

Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk: (1) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola keluarga berencana desa yang dibina sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jenis atau bentuk kegiatan yang dilakukan, (2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan pada pengelola keluarga berencana desa yang dibina untuk menyediakan dukungan yang diperlukannya sebagai upaya yang mengarah kepada proses alih kelola program, (3) Menumbuhkan dan mengembangkan proses pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera bagi seluruh masyarakat desa yang dibinanya.

Dalam melaksanakan pelatihan ini Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional bekerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintah lainnya seperti: Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan lain-lain.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelatihan ini antara lain berupa pelatihan operasional keluarga berencana seperti pelatihan perencanaan, keuangan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan,

pelayanan kontrasepsi, penyuluhan, komunikasi dan lain-lain.

Supaya kegiatan pelatihan terhadap para pengelola berhasil dilaksanakan maka dilakukan suatu metode dan teknik yang tepat dalam proses penyampaiannya, yaitu dengan menggunakan pendidikan orang dewasa. Prinsip-prinsip yang digunakan antara lain: (1) Dalam proses belajar, hubungan antara guru dengan murid bersifat timbal balik dan lebih berupa saling membantu, (2) Lebih menekankan pada suatu proses belajar dengan teknik komunikasi dua atau banyak arah untuk memanfaatkan pengalaman orang dewasa, (3) belajar lebih dipandang sebagai pemecahan masalah daripada pemberian pelajaran, dan (4) Peserta bersama-sama pengajar yang menentukan materi yang akan dipelajari berdasarkan kebutuhan (Zainuddin, 1987).

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip di atas maka dalam pelaksanaan latihan diusahakan suasana belajar yang santai, pelatih adalah sebagai pembimbing dan yang mengarahkan, penggunaan metode pelatihan yang menarik, sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang tersedia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, metode pelatihan yang diberikan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional antara lain berupa ceramah, diskusi, studi kasus, demonstrasi, dan teknik kerja lapangan. Misalnya pelatihan dengan menggunakan ceramah, merupakan suatu bentuk interaksi melalui penerangan dan penataran secara lisan oleh seseorang terhadap kelompok pendengar/sasaran, atau suatu cara penyampaian bahan pelajaran dengan alat perantara berupa suara/lisan (Vitayala, Aida, 1987).

Tujuan yang dapat dicapai dari ceramah, menurut Wiriaatmadja (1983) antara lain:

1. Membangkitkan motivasi (dorongan) belajar
2. Menjelaskan suatu bagian pelajaran yang dirasakan sulit oleh seluruh kelas
3. Mengupas suatu bahan pelajaran
4. Memperluas isi pelajaran

5. Memberi pengalaman kepada pendengar untuk mengutip hal-hal yang penting dalam suatu ceramah.

Dari tujuan di atas terlihat bahwa metode ceramah memberikan kesempatan pengalaman kepada peserta untuk belajar mendengarkan suatu uraian secara lisan sebab di dalam kehidupan orang dewasa, belajar mendengarkan dan memahami suatu pembicaraan adalah penting sekali dan banyak dijumpai dalam kegiatan hidup sehari-hari.

Selain metode ceramah di atas, pelatihan dengan menggunakan metode diskusi juga dapat menunjang usaha pengembangan sikap sosial dan sikap demokratis serta dapat menumbuhkan dan mengembangkan cara berpikir dan sikap ilmiah. Sebab diskusi adalah kegiatan bertukar pendapat dan pengalaman dalam rangka memecahkan masalah melalui konsensus atau pertemuan pendapat (Vitayala, 1987). Dengan metode diskusi, sasaran dilatih untuk mampu bertugas sebagai pemimpin, peninjau (*observer*), pencatat (*Recorder*) dan sebagai sumber (*Resource Person*), oleh karena itu setelah sasaran terjun ke masyarakat mereka akan terampil dan mampu menjalankan tugas dengan baik.

Bentuk-bentuk diskusi dalam kegiatan belajar mengajar ditinjau dari tujuannya oleh Goldberg (1985):

1. *The Social Problem Solving Meeting*, para siswa memecahkan masalah sosial di kelasnya, dan diharapkan setiap siswa merasa terpenggil untuk mempelajari dan bertindak laku sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.
2. *The Open-Ended Meeting*, para siswa berdiskusi mengenai masalah apa saja yang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari
3. *The Educational Diagnosis Meeting*, para siswa berdiskusi mengenai pelajaran di kelas dengan maksud untuk saling mengoreksi pemahaman mereka atas pelajaran yang telah diterimanya agar masing-masing anggota memperoleh pemahaman yang lebih baik dan benar.

Pelatihan dengan menggunakan studi kasus yang juga merupakan salah satu metode yang digunakan dalam melatih para pengelola ini adalah suatu cara untuk mengajar dengan merangsang seseorang menganalisa dan melakukan sintesa dalam kesatuan struktur atau situasi dimana masalah itu berada, atas inisiatif sendiri. Studi kasus terutama dipergunakan dalam latihan-latihan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan sikap dalam mengambil suatu keputusan.

Menurut Vitayala, (1987) studi kasus bertujuan untuk menolong para peserta untuk mengembangkan keterampilan, melatih para peserta dalam melakukan analisa dan mengambil keputusan, serta untuk mempengaruhi pembentukan sikap dan membekali suatu pengalaman. Dari tujuan di atas maka studi kasus dapat memberikan suatu situasi belajar yang bergantung pada keterkaitan (*involvement*) dan peran serta (*participation*) dari para pesertanya.

Selain metode-metode pelatihan di atas Badan Koordiansi Keluarga Berencana Nasional juga menggunakan metode demonstrasi dan metode teknik kerja lapang (karyawisata) dalam membina para peserta, karena kedua metode ini merupakan suatu cara yang efektif dalam menyajikan bahan pelajaran yaitu dengan mempertunjukkan obyeknya secara langsung atau cara melakukan sesuatu dengan mempertunjukkan prosesnya, misalnya kunjungan sejumlah peserta suatu Latihan Keluarga Berencana ke sebuah desa dengan maksud untuk mempelajari hubungan sosial atau untuk memperluas cakrawala pengetahuan tentang program keluarga berencana.

Dengan penggunaan metode-metode di atas, diharapkan pelatihan dapat berhasil guna dan berdaya guna, dan para pengelola keluarga berencana desa akan semakin terlatih dan mampu bertugas di lapangan dengan baik.

Pada PJP I sampai dengan tahun ke-4 Pelita V (1992/1993) telah dilatih sebanyak 4.539.226 tenaga pengelola program KB, yaitu Pelita I 37.616 orang, Pelita II 76.689 orang, Pelita III

168.741 orang, Pelita IV 295.652 orang dan Pelita V s/d 1992/1993 sejumlah 1.980.265 orang.

B. Lembaga Pemerintah Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan KB

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peranan yang penting dalam program keluarga berencana di Indonesia. Hal ini disebabkan karena BKKBN merupakan Badan Koordinasi dalam pelaksanaan program keluarga berencana dan juga merupakan lembaga pemerintah yang menjadi unit pelaksana keluarga berencana yang strategis.

Untuk meningkatkan keberhasilan program keluarga berencana nasional maka dalam pelaksanaannya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional didukung dan dibantu oleh lembaga-lembaga pemerintah lainnya, misalnya:

Departemen Kesehatan; merupakan unit pelaksana terbesar yang menangani pelayanan kontrasepsi, KIE dan pelayanan medis yang berkaitan dengan keluarga berencana.

Departemen Agama; membimbing dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dalam bidang keluarga berencana di lingkungan Departemen Agama, membahas hambatan-hambatan pelaksanaan keluarga berencana di dalam masyarakat yang berhubungan dengan BKKBN dan bekerjasama dengan instansi lain yang bergerak dalam bidang keluarga berencana dalam menuju masyarakat dan bangsa Indonesia yang sejahtera dan makmur.

Departemen Dalam Negeri; bertindak sebagai penanggung jawab sektor pembangunan daerah dan bertugas dalam melancarkan pendidikan keluarga berencana masyarakat desa.

Departemen Penerangan ; membantu aktivitas-aktivitas keluarga berencana khususnya dalam menciptakan kondisi yang *favourable* di kalangan masyarakat, dengan jalan melaksanakan pers, radio, TV, film dan iklan-iklan.

Lembaga/instansi pemerintah yang lain yang juga aktif dalam menggerakkan program keluarga berencana adalah Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Keuangan, Departemen Sosial, Badan Pertahanan Keamanan (Hankam) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Dengan kerjasama dan keterlibatan dari berbagai instansi pemerintah diharapkan program keluarga berencana baik secara substansial maupun operasional dapat berkembang dengan baik. Secara substansial perkembangan keluarga berencana bergerak dari keluarga berencana yang teknis medis murni, menjadi keluarga berencana yang berintegrasi dengan pembangunan nasional dengan tujuan pelebagaan dan pembudayaan Norma Keluarga kecil Bahagia Sejahtera. Sedangkan secara operasional bergerak dari program menjadi suatu gerakan yang berintikan kepada kemandirian masyarakat.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

1. Kesimpulan

Program keluarga berencana nasional yang bertujuan untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk serta untuk melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera memerlukan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat baik sebagai perencana maupun sebagai pelaksana program.

Keberhasilan program keluarga berencana nasional tidak lepas dari keberhasilan program keluarga berencana di desa dan keberhasilan program keluarga berencana di desa tidak lepas dari peran serta para pengelola keluarga berencana desa. Para pengelola keluarga berencana desa terdiri dari Petugas Lapangan Keluarga Berencana Desa (PLKB), Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Institusi Masyarakat.

Pengelola program keluarga berencana berfungsi sebagai motivator program keluarga berencana di desanya. Sebagai motivator berarti para pengelola berfungsi untuk mendorong dan

menggerakkan masyarakat berpartisipasi terhadap program keluarga berencana, mendorong masyarakat dan keluarga untuk membangun keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta mendorong atau menggerakkan masyarakat dan keluarga dalam membangun keluarga kecil yang mandiri.

Pada garis besarnya peranan pengelola program keluarga berencana desa meliputi: (1) Sebagai pengurus, (2) Sebagai penyuluh, (3) Sebagai Pembina, (4) Sebagai sumber informasi, (5) Berperan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan masyarakat melalui wadah kegiatan agar dapat mengambil alih peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan program keluarga berencana.

Untuk menunjang peranan para pengelola, maka mereka mendapat pembinaan dari pemerintah yaitu dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, yang dilakukan melalui pelatihan. Pelatihan ini dimaksudkan untuk: (1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengelola, (2) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan para pengelola dan, (3) Menumbuhkan dan mengembangkan proses pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera bagi Masyarakat yang dibinanya.

Secara umum pembinaan pengelola program keluarga berencana desa melalui pelatihan bertujuan agar pengelola keluarga berencana semakin terlihat dan merasa ikut memiliki program, sehingga akan ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan program keluarga berencana. Dengan demikian para pengelola akan lebih mampu mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program keluarga berencana, sehingga arti dari program keluarga berencana akan semakin dimengerti dan dihayati oleh seluruh masyarakat, selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman hidup dan untuk meraih masa depan keluarganya.

2. Saran-saran

Penelitian program keluarga berencana perlu terus dilaksanakan. Khusus mengenai para pengelola program keluarga berencana desa perlu suatu penelitian yang mendalam, yaitu untuk melihat keikutsertaan atau peranan mereka sebagai unsur pengelola kegiatan program keluarga berencana di desa, juga melihat secara nyata sejauhmana kebersamaan/kerjasama pengelola tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Adjid. 1985. Pola Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Pembangunan Pertanian Berencana. Universitas Pajajaran, Bandung.
- Alvi A. Goldberg. 1985. Komunikasi Kelompok. UI, Jakarta
- BKKBN. 1982. Informasi Dasar Kependudukan dan KB. PT Cemerlang Abadi, Jakarta.
- _____. 1983. Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat 84/85-88/89 Program Kependudukan KB Naskah V. BKKBN, Jakarta
- _____. 1986. Mekanisme Pengelolaan Program KB Nasional di Tingkat Desa/Kelurahan. BKKBN, Jakarta.
- _____. 1989. Penelahaan Gerakan KB Nasional Repelita V dan VI Bulan Pertama Tahun 1993/1994 Materi I. BKKBN, Jakarta.
- _____. 1991. Buku Pedoman Petugas Fasilitas Pelayanan KB. Direktorat Bina Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
- _____. 1993. Pedoman Operasional Pendidikan KB Tingkat Kecamatan dan Desa. BKKBN, Jakarta.
- _____. 1994. Informasi Gerakan KB Nasional Selama Pembangunan Jangka Panjang I. Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, Jakarta.
- Buddy Prasadja. 1974. Pembangunan Masyarakat Desa dan Kepemimpinan. Rajawali, Jakarta.
- Chitambar, J.B. 1961. Evaluation of Training Programer. New Delhi.
- Departemen Penerangan. 1990. Pidato Kenegaraan Presiden, tanggal 16 Agustus 1990. Jakarta.
- Emelia Handayani. 1994. Peranan Konseling dalam Membangun Keluarga Sejahtera. Berita Yudha, 23 Nopember 1994.

- Hadari Nawawi. 1983. Metode Penelitian Bidang Sosial. UGM, Yogyakarta.
- Herujito, Yayat. 1988. Dasar-dasar Manajemen. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Bogor.
- Kurniawati, R. 1984. Keikutsertaan Kelompok Sosial Tradisional dalam Program Kependudukan dan KB. Sosek IPB, Bogor.
- Mahmudin. 1983. Sosiologi Pedesaan. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta
- Masri Singarimbun. 1987. Metode Penelitian Survei. LP3ES, Yogyakarta.
- MPR RI. 1993. Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia. Direktorat Pendidikan Tinggi, Depdikbud.
- Mugniesyah, Sugiah. 1986. Kepemimpinan wanita dalam Pembangunan Pedesaan. Fakultas Pascasarjana IPB, Bogor.
- Riyanto, Eddy. 1989. Sistem Penyuluhan dan Perubahan Perilaku Masyarakat pada Program Nasional Keluarga Berencana. IPB Bogor.
- Said Rusli. 1983. Kapadatan Penduduk dan Peledakannya. PN balai Pustaka, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1987. Sosiologi Pedesaan. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugarda, Tarya. 1983. Sosiologi Pedesaan. Depdikbud, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta.
- Vitayala, Aida. 1987. Menggerakkan Masyarakat Lewat Penyuluhan dalam Bahan Kuliah Perbekalan Mahasiswa KKN 1994, IPB. LPPM, IPB Bogor,
- _____. 1993. Motivasi Belajar Mengajar. Bahan Kuliah Mata Ajaran POD, IPB Bogor.

Wiriaatmadja, S. 1983. Pokok-pokok Penyuluhan Pertanian. CV
Yasaguna, Jakarta.

UNIVERSITAS TERBUKA

LAMPYRAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tiap Propinsi Tahun 1971, 1980 dan 1990

No	Propinsi	Jumlah Penduduk (000)			Laju Pertumbuhan	
		1971	1980	1990	1971-1980	1980-1990
1	Daerah Istimewa Aceh	2,009	2,611	3,416	2.93	2.72
2	Sumatera Utara	6,622	8,361	10,256	2.60	2.06
3	Sumatera Barat	2,793	3,407	3,999	2.21	1.62
4	Riau	1,642	2,169	3,306	3.11	4.31
5	Jambi	1,006	1,446	2,016	4.07	3.38
6	Sumatera Selatan	3,441	4,630	6,277	3.32	3.09
7	Bengkulu	519	768	1,179	4.39	4.38
8	Lampung	2,777	4,624	6,006	5.77	2.65
9	DKI Jakarta	4,579	6,503	8,254	3.93	2.41
10	Jawa Barat	21,624	27,454	35,381	2.66	2.57
11	Jawa Tengah	21,877	25,373	28,522	1.64	1.18
12	D.I.Y. Yogyakarta	2,489	2,751	2,913	1.10	0.57
13	Jawa Timur	25,517	29,189	32,504	1.49	1.08
14	Bali	2,120	2,470	2,778	2.69	1.18
15	Nusa Tenggara Barat	2,204	2,725	3,370	2.36	2.15
16	Nusa Tenggara Timur	2,295	2,737	3,265	1.95	1.79
17	Timor Timur	-	555	1,148	-	3.02
18	Kalimantan Barat	2,020	2,486	3,236	2.31	2.68
19	Kalimantan Tengah	702	954	1,336	3.43	3.88
20	Kalimantan Selatan	1,699	2,065	2,538	2.16	2.32
21	Kalimantan Timur	734	1,218	2,177	5.73	4.42
22	Sulawesi Utara	1,718	2,113	2,479	2.31	1.60
23	Sulawesi Tengah	914	1,213	1,711	3.86	2.87
24	Sulawesi Selatan	5,181	6,062	6,982	1.74	1.42
25	Sulawesi Tenggara	714	912	1,350	3.09	3.66
26	Maluku	1,090	1,412	1,856	2.88	2.78
27	Irian Jaya	923	1,174	1,641	2.67	3.41
	INDONESIA	119,701	147,491	179,323	2.32	1.97

Sumber : BPS

Lampiran 2. Sasaran/Perkiraan Permintaan dan Pencapaian Peserta KB Baru selama PJP I

Tahun Anggaran	Jumlah Peserta KB Baru Sasaran/Perkiraan	Pencapaian	Persentase Terhadap Sasaran/Perkiraan
69/70	100,000	53,103	53.1
70/71	125,000	181,059	144.8
71/72	550,000	519,330	94.4
72/73	1,000,000	1,078,889	107.9
73/74	1,250,000	1,369,077	109.5
PELITA I	3,025,000	3,201,458	105.8
74/75	1,500,000	1,592,891	106.2
75/76	1,796,000	1,966,585	109.5
76/77	1,976,000	2,212,790	112.0
77/78	2,296,833	2,248,468	97.9
78/79	2,291,100	2,215,884	96.7
PELITA II	9,859,933	10,236,618	104.4
79/80	2,341,071	2,229,791	95.2
80/81	2,677,918	3,051,244	113.9
81/82	2,018,109	2,966,897	147.0
82/83	3,621,595	3,885,476	107.3
83/84	4,002,860	5,246,184	131.1
PELITA III	14,661,553	17,379,592	119.5
84/85	4,819,045	4,072,779	84.5
85/86	5,284,176	5,067,713	95.9
86/87	5,323,000	4,929,003	92.6
87/88	5,589,007	5,185,574	92.8
88/89	4,730,646	5,423,876	114.7
PELITA IV	25,745,874	24,679,410	95.9
89/90	4,582,800	4,247,318	93.5
90/91	4,612,900	4,448,224	97.1
91/92	4,688,800	4,530,950	-
92/93	4,724,200	4,347,093	92.4
93/94	4,951,200	3,477,244	70.7
PELITA V	23,523,900	21,137,327	89.9
TOTAL	76,816,260	76,634,005	99.8

Sumber: BKBN PUSAT

Lampiran 3. Pencapaian Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi Selama PJP I

PELITA	Jumlah dan Persentase KB Baru							TOTAL
	Al	IUD	Kondom	Ob. Vag	Suntikan	Met. Operasi	Implant	
PELITA I	1,000,854 17.5	991,505 31.0	338,667 10.6	30,432 1.0	- -	- -	- -	1,201,458 100.00
PELITA II	7,000,773 13.6	1,611,698 15.7	1,314,389 12.8	9,148 0.1	159,296 1.6	122,313 1.2	- -	10,238,618 100.00
PELITA III	9,500,775 17.3	3,808,866 21.9	948,759 5.4	19,618 0.1	2,290,321 13.2	360,853 2.1	- -	17,379,592 100.00
PELITA IV	9,500,882 1.5	5,316,681 21.6	831,968 3.4	2,039 0.0	8,131,308 32.9	518,610 1.5	377,512 0.0	24,679,010 100.00
PELITA V	6,000,021 1.2	3,852,815 18.2	421,075 2.0	- -	8,057,436 38.1	653,133 3.1	1,569,909 7.4	21,137,327 100.00
TOTAL	34,800,305 5.5	15,581,585 20.3	3,854,258 5.0	61,238 0.1	18,638,361 24.3	1,654,909 2.2	1,947,349 2.6	76,634,085 100.00

Sumber: BKKBN RI/AT

UNIVERSITAS TERBUKA

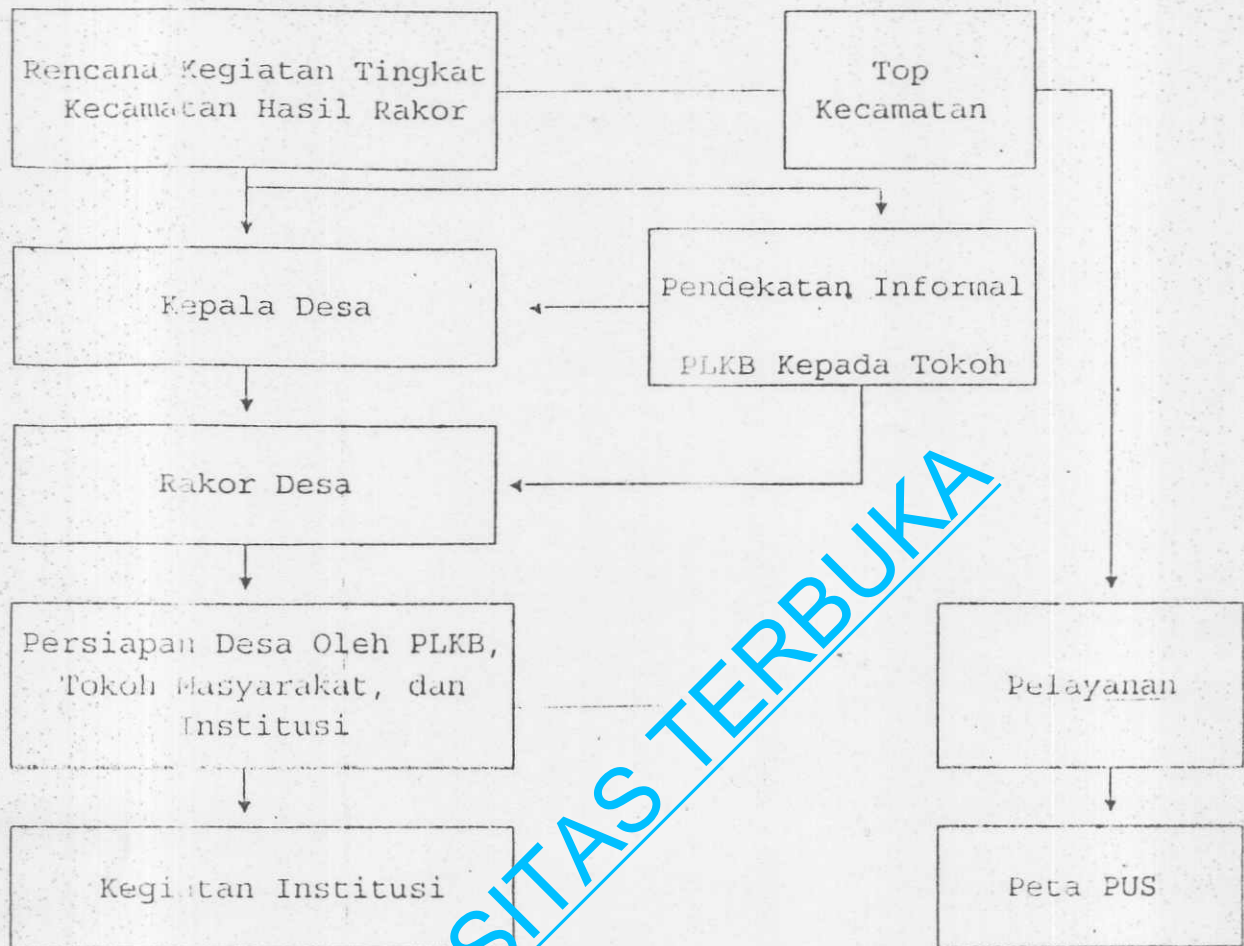
Lampiran 4. Persentase Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi di Indonesia Selama P5P I

PILITA	Tahun	Metode Kontrasepsi						Jumlah
		Pil	IUD	Pondja	Suntikan	Met. Operasi	Implant	
I	71/72	43.2	55.3	1.5	-	-	-	366,819
	72/73	44.5	53.5	2.0	-	-	-	1,025,472
II	73/74	51.5	46.6	2.1	-	-	-	1,680,155
	74/75	59.3	34.0	5.6	0.1	0.4	-	2,469,144
	75/76	62.3	31.6	5.0	0.3	0.2	-	3,202,335
	76/77	59.8	34.0	4.2	0.8	1.2	-	3,808,590
III	77/78	60.1	32.3	4.4	0.2	1.7	-	4,687,723
	78/79	64.4	27.0	5.5	1.1	2.0	-	5,541,517
	79/80	63.5	26.9	6.3	1.0	2.3	-	6,457,517
	80/81	64.1	25.9	6.1	1.4	2.5	-	7,732,517
	81/82	64.4	26.9	5.8	0.9	2.0	-	8,809,020
IV	82/83	59.8	25.9	5.4	5.9	3.0	-	11,211,285
	83/84	55.4	27.0	4.9	9.6	3.1	-	14,422,521
	84/85	53.8	27.7	4.4	11.2	2.9	-	15,694,832
	85/86	47.9	27.9	4.3	16.3	3.4	0.2	15,319,518
	86/87	48.5	24.2	4.4	19.0	2.5	0.5	16,680,373
	87/88	50.5	22.5	3.9	18.7	3.6	1.2	18,309,614
V	88/89	50.4	22.4	3.9	17.2	3.9	2.3	18,768,596
	89/90	41.4	27.0	2.6	20.5	4.7	1.1	18,575,171
	90/91	37.8	26.0	2.4	22.5	5.2	1.3	18,771,971
	91/92	35.6	25.8	2.2	24.7	5.5	1.2	20,262,944
VI	92/93	34.1	24.8	2.0	26.9	5.6	1.6	21,378,703
	93/94	32.6	24.5	1.9	28.4	5.5	1.1	21,950,339

Sumber: BPS, PUSAKI

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 5. Mekanisme Kegiatan Program KB di Desa/Kelurahan



UNIVERSITAS TERBUKA